

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, 2010, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshari, Hafi, 1983, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional 1983.
- Assiddiqie, Jimly, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bauman, Richard W. And Tsvi Kahana, 2006, The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State, Cambridge: Cambridge University Press)
- Budiardjo, Miriam, 1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Fachruddin, Irfan 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung.
- Griffin, Ricky W, 2007, Gregory Moorhead, Organizational Behavior, Eighth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Hadi, Sutrisno, 1986, Metodologi Research I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Harjowidigdo, Rooseno, 2004, Wetgevingsleer di Negeri belanda dan Perkembangan Undang-Undang Saat Ini di Indonesia. Jakarta: BPHN.
- Hidjaz, Kamal, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi: Makasar.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009, Judicial review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.

- HR, Ridwan 2013, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- HR, Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'matul. 2019, "Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan." Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Hurlock, Elizabeth, 2011, Psikologi Perkembangan, Bandung: Airlangga.
- Indrati S, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius
- Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Institusi, : Universitas Pattimura.
- Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,.
- Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Lubis, M. Solly. 1989, Landasan dan teknis Perundang-undangan. Bandung: Mandar Maju.
- Lydia Martono, Harlina, 2006, Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan Jakarta: Balai Pustaka.
- Madril, Oce. 2019, "Pembentukan Lembaga Regulasi Nasional Sebagai Upaya Reformasi Regulasi." Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Mahfud MD, Moh. 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD, Moh, 2002. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Mamuji, Sri. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung:Alumni.
- Manan, Bagir. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Mardalis, 2004, “Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal”, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Martosoewigjo,Sri Soemantri, 1984, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV Rajawali Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit Kencana,
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Naim, Ngainun, 2012, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Natabaya, HAS, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saifuddin, 2009,) *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Salam, Dharma Setyawan, 2002, Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Setiadi, Wicipto, 2022, Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jakarta; Damera Press.
- Sidharta, Bernard Arief. 2011, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal." Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, diedit oleh Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1988, Teknik Membuat Undang-Undang, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.10 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri. 1997, Hak Uji Material di Indonesia. Edisi 2, Cet. 1. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, "Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Tjandra, W. Riawan, 2019, "Reformasi Regulasi dalam Penguatan Kelembagaan yang Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan." Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tohari, Ahsin, 2016, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Zaelani, Jurnal Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation*), Jurnal Legislasi Indonesai, 2012.

Jurnal

Bahri, Saiful “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>.

European Commission, Legislative Drafting, a Commission Manual.
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/legis_draft_com_m_en.pdf,

Robinson, William 2005, “*How the European Commission drafts legislation in 20 languages*”. *Clarity (Journal of the international association promoting plain legal language)*.

Triadi, Irwan, Akhfa Kamilla Sulaeman, 2024, Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol-1.

Yudanti, Anggita Wicipto Setiadi, 2022, Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Hukum dan Konstitusi Volksgeist.

Makalah/Tesis/Disertasi

Ade Irawan Taufik, 2020, Membangun Mekanisme Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Ex Post Review) Dalam Penataan Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Tesis.

Assiddiqie, Jimly, 2003, Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.

- Attamimi, A Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1985, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni, Bandung.
- Bentham, Jeremy, Dalam Pataniari Siahaan, Perubahan Kekuasaan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, 2010.
- Crabbe, VCRAC, 1994, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited).
- Febriansyah, Ferry Irawan, 2016, Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Artikel.
- Flores, Imer B, 2009, “Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice”, Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2015, Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Jurnal.
- Putuhena, M. Ilham F, 2012, Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi, Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 3.
- Ramadani, Kiki, 2022, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasa Dusturiyah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sikumbang, Sony Maulana, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, Modul Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Edisi 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perpres 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Pedoman/Laporan/Risalah Rapat

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Perlindungan Dan Jaminan Sosial, BPHN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya, BPHN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Laporan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07
Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undangn tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan tanggal 10 Juni 2011, Dewan Perwakilan
Rakyat RI.

Website

<https://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang

<https://kbbi.web.id/delegasi>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01450011/apa-yang-dimaksud-dengan-pouvoir-reglementair->

<https://ruslijacub.wordpress.com/>

<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-imperfecta.html>

<https://www.kppod.org/berita/view?id=464>